TATA KELOLA KEUANGAN DESA

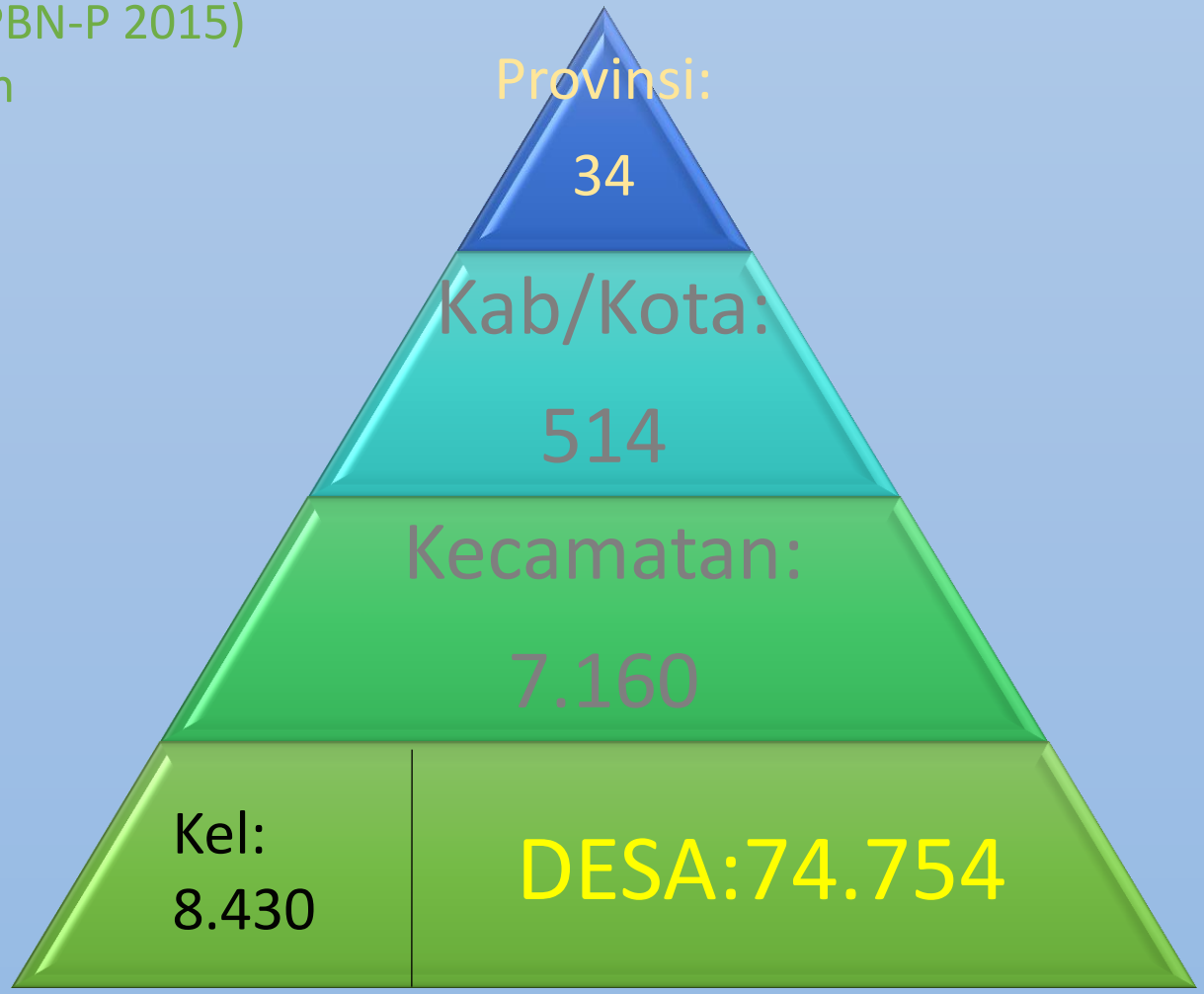
OLEH:

DADANG KURNIA

Ketua Kompartemen Akuntan Sektor Publik

WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DANA DESA (APBN-P 2015)
Rp 20,776 Triliun
(UU No 3/2015)



Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 255.153.932 Data: Permendagri 56 Tahun 2015

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DESA SEJAHTERA

Pemerintah Pusat
- Kemenkeu
- Kemendagri
- Kemendes PDTT

Provinsi

Kab/Kota

Masy/P III

- Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot)
- Ban.Keu
- ADD
- Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae
- PADes/ Hibah

RPJMN/ RKP

RPJMD/ RKPD

Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT)

TITIK KRITIS
Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP

DESA

Kepala Desa | Perangkat Desa | BPD | Lembaga Kemasy. Desa

RPJM Desa/ RKP Desa → APB DESA

Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya

Belanja Desa

70%	Pemb. & pemberdayaan Masy. D	Bel. Pegawai
		Bel. Bar&Jasa
30%	Penghasilan Tetap / Operasional	Bel. Modal

PBJ Pajak

Pembiayaan Desa

Laporan ke Bup/Wali:
- LRA Semesteran dan Tahunan
- LPJ Realisasi APB Des (Tahunan)
- LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan
- Lap. Dana Desa per Semester

Laporan ke BPD
- Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan)

Pengawasan & Pembinaan
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (Kec/Insp)

LINGK. STRATEGIS
UU 6/2014
UU 23/2014

PP 43/2014 jo PP 47/2015
PP 60/2014 jo PP 22/2015
PP 60/2008

PMK 93/2015

Perka LKPP 13/2013

Permendagri
113/2014
114/2014
52/2015

Permen.DesaPDTT
1/2015
3/2015
5/2015

Aliran Keuangan

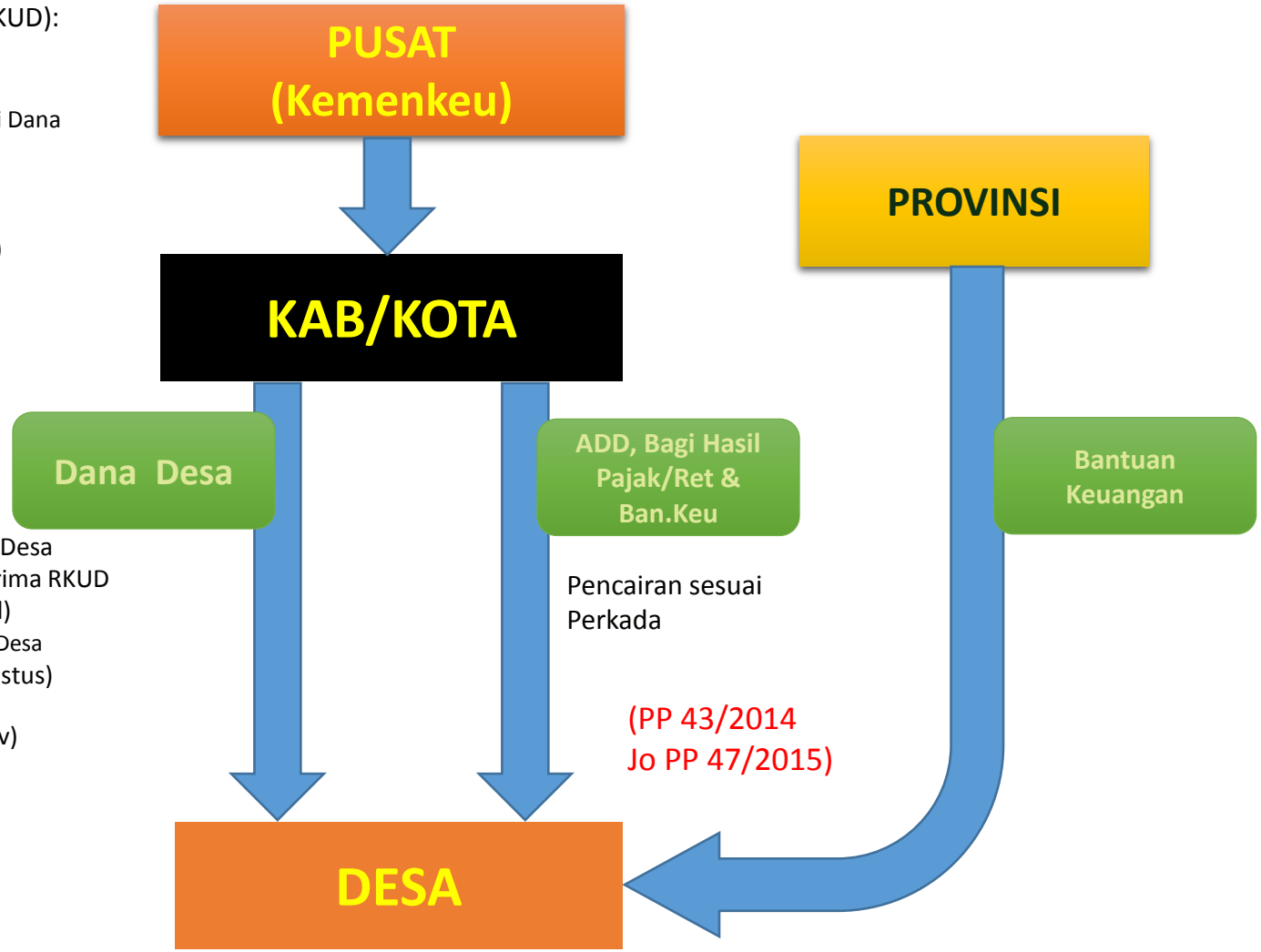
Dana Desa (RKUN => RKUD):
Tahap I: 40% (April)
Syarat:
- Perkada Tatacara Alokasi Dana Desa untuk setiap desa
- Perda APBD Kab/Kota

Tahap II: 40% (Agustus)
Syarat: -

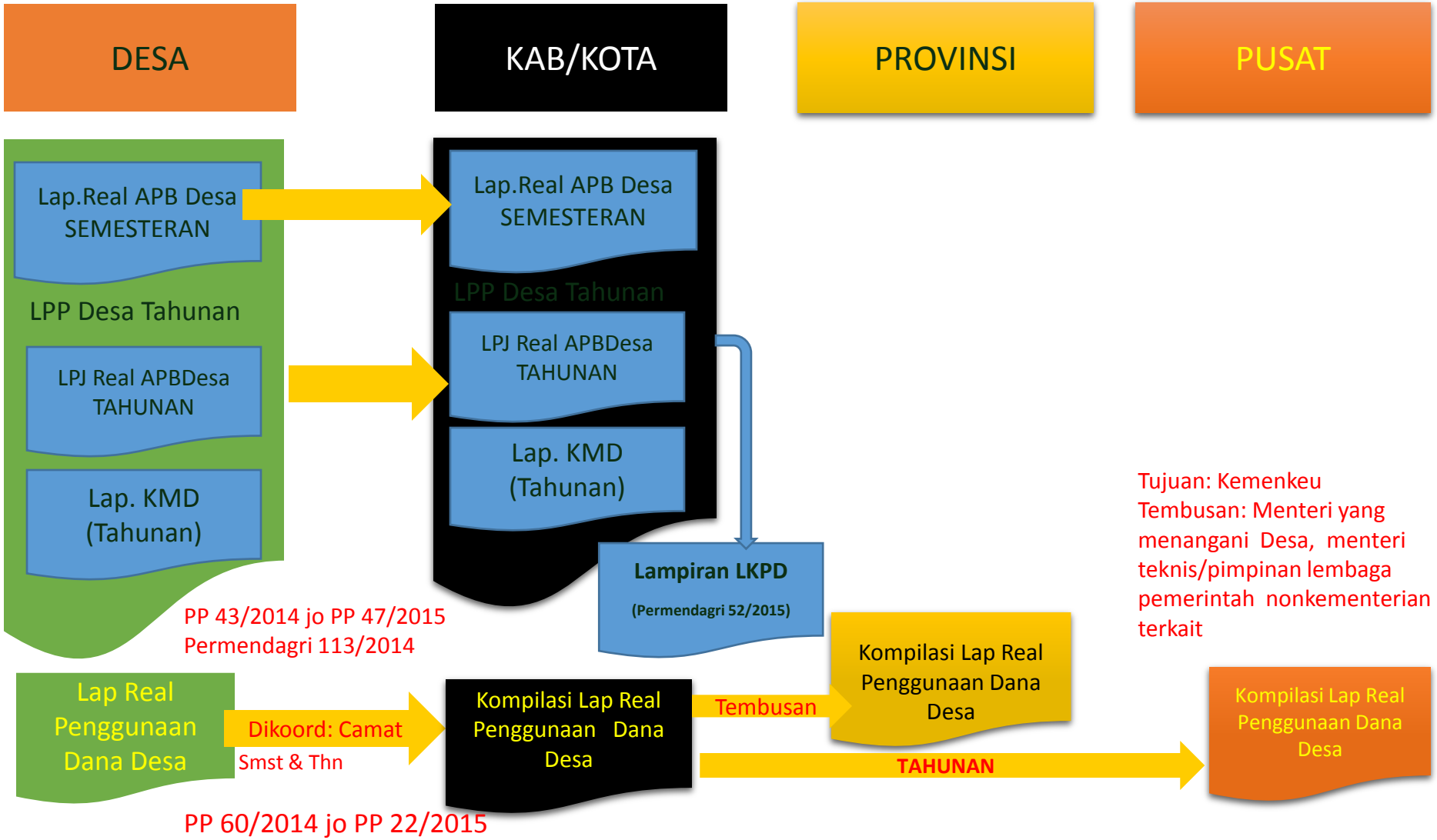
Tahap III: 20% (Nov)
Syarat: -

(PP 60/2014
Jo PP 22/2015)

RKUD => Rek. Kas Desa
7 hari setelah diterima RKUD
Tahap I: 40% (April)
Syarat: Perdes APB Desa
Tahap II: 40% (Agustus)
Syarat: -
Tahap III: 20% (Nov)
Syarat: -



ALUR PELAPORAN



Titik Kritis Pengelolaan Keuangan Desa

Tingkat Pemerintahan

PEMPUS
- Koordinasi Kementerian (Kemendagri & KDPDTT)
- Ketentuan Pelaksanaan

PemProv.
- Pembinaan & Pengawasan

Pemkab/ Kota
- Kebijakan penghitungan alokasi: Dana Desa, ADD dan Bagi Hasil
- SDM (Kec, Ins, BPMPD, DPPKAD)
- Kebijakan PBJ Desa dan Pengelolaan Keu Desa

Pemdes
- SDM Kades, perangkat Desa dan BPD
- Sarana dan Prasarana Desa
- Kebijakan tingkat Desa

Koordinasi stakeholders, Peningkatan Kapasitas SDM, Penyusunan Juklak yg jelas/implementatif, SIM-DES, SPIP

Proses Pengelolaan Keuangan Desa

Keselarasan Perencanaan
Tingkat Partisipasi
Kualitas RKP Desa
→ Perencanaan (RKPDesa)

Unifikasi dan Integrasi Anggaran
Harmonisasi Kades & BPD
Evaluasi APB Desa oleh kec
→ Penganggaran

Pengadaan B/J
Kewajiban Perpajakan
Kades 'Powerfull'
→ Pelaksanaan

Administrasi pembukuan
Cara peng-SPJ-an
Pencatatan kekayaan desa
Konsep 'Bel. Modal' & Bel. Barang
→ Penatausahaan

Jumlah Laporan yg hrs dibuat
Tatacara Pelaporan
→ Pelaporan & Pertanggungjawaban

Efektifitas pengawasan
Kesiapan aparat pengawasan
→ Pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN SIMULASI

TAHUN ANGGARAN 2015

SISTEM TATAKELOLA KEUANGAN DESA

(SIMDA DESA)

Telah diLaunching tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh stakeholders terkait seperti KPK-RI, Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Gubernur, Bupati, LKPP

Menuju Tatakelola Keuangan Desa yang Bersih dan Transparan

Copyright @2015 BPKP

Peran IAI dalam Tata Kelola Keuangan Desa

DPN IAI

- Koordinasi dg kementerian/lembaga terkait

IAI WILAYAH

- Peningkatan Kompetensi:
  - Aparat Kabupaten/Kota dan Desa
  - Tenaga Pendamping
- Pendampingan Aplikasi Simda Desa:
  - Koordinasi dengan Perwakilan BPKP
- Pelaporan:
  - IAI Wilayah melaporkan hasil kegiatan ke DPN IAI

TERIMA KASIH